

# GRAND DESAIN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh:

**I Gusti Ngurah Santika**

Fakulta Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwijendra  
email: ngurahsantika88@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai langkah atau kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai grand desain untuk upaya menghadapi revolusi industri 4.0. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa berbagai langkah atau kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai grand desain untuk menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu (1) Kurikulum 2013 (K13), (2) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), (3) Gerakan Literasi Nasional (GLN).

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pemerintah, Pendidikan, Revolusi, Industri

## 1. PENDAHULUAN

Dunia umumnya serta Indonesia pada khususnya sedang memasuki era industri baru yang ditandai dengan era digitalisasi di pelbagai sektor kehidupan. Para pakar menyebut ini sebagai era revolusi industri 4.0 (Suwardana, 2017;103). Revolusi Industri Keempat adalah sebuah kondisi pada abad ke-21 ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi (Wurianto, 2018;89). Era Industri 4.0 tiada henti menghadirkan dan menawarkan beragam corak perubahan yang tak mungkin bisa dibendung siapa pun termasuk oleh negara sekali pun. Hadirnya revolusi industri 4.0 telah mendorong dan memaksa dunia secara global untuk senantiasa beradaptasi mengikuti bandul perubahan yang bergerak begitu dinamis serta semakin cepat dari waktu ke waktu. Di era revolusi industri 4.0. yang ditandai serba digital dan konektivitas dengan kecanggihan teknologi, maka tanpa terkecuali semua bidang kehidupan manusia telah terpapar oleh pengaruhnya, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Nyaris semua dimensi kehidupan manusia bersentuhan dengan teknologi.

Banyak negara di dunia yang bersikap optimis dalam memandang revolusi industri 4.0., karena dinilai mampu menopang dan mendongkrak trend perubahan ke arah yang jauh lebih positif. Pesatnya perkembangan teknologi digital diyakini akan semakin memudahkan maupun meningkatkan produktivitas, efektivitas dan kreativitas, serta efisiensi manusia dalam melakukan kegiatannya di segala bidang kehidupannya. Menyadari berbagai manfaatnya, umat manusia di seluruh dunia mulai kini berusaha mendekatkan dan mengakrabkan dirinya dengan teknologi. Meskipun sambutan terhadap kemajuan teknologi begitu hangat tetapi baik negara berkembang maupun negara maju

sesungguhnya memiliki tingkat kekhawatiran yang relatif sama, bahwa revolusi industri 4,0 juga akan membawa pengaruh buruk bagi kehidupan rakyatnya. Sehingga harus benar-benar dipahami secara komperhensif atau holistik, bahwa revolusi industri 4.0. bukan semata-mata menjanjikan dan menawarkan beragam kemudahan bagi manusia. Tetapi dibalik itu semua tersingkap sebuah pertanyaan besar yang harus segera dijawab Pemerintah dan generasi milenial di abad 21 ini. Apakah revolusi industri 4.0.yang menerjang negara mendatangkan perubahan yang menguntungkan atau merugikan bagi dirinya? Dengan berpedoman pada tantangan tersebut sudah sewajarnya bila setiap negara harus mulai merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif (Ghufron, 2018;333). Tidak terkecuali dengan Indonesia yang kini tengah dilanda gelombang revolusi industri 4.0, sehingga pastinya berdampak luas bagi rakyatnya.

Mengingat berbagai akses negatif yang dapat menunggangi atau mendomplengnya, maka sudah sepatutnya Indonesia lebih memfokuskan perhatiannya dan mengerahkan segala potensinya dalam menghadapi revolusi industri 4.0. misalnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terlebih lagi sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa (Muhardi, 2004;475). Revolusi industri 4.0 menghendaki dan menuntut adanya upaya perbaikan mutu SDM dengan menekankan aspek kompetensi yang berpijak, bertumpu, dan berorientasi pada keterampilan hidup (*lifeskill*). Dalam konteks ini, bahwa Indonesia hingga sekarang ini memiliki sikap positif dan optimisme yang sangat tinggi dalam menyambut hadirnya revolusi industri 4.0. Tetapi bilamana sikap Pemerintah tersebut tanpa diiringi, dibarengi, dan dimbangi dengan kebijakan yang tepat, maka semuanya akan menjadi sia-sia belaka, bahkan bisa jadi menimbulkan problematika serius ke

depannya. Di era revolusi Industri 4.0. ini Indonesia membutuhkan kebijakan progresif dan revolusioner yang lebih menekankan pada penelitian yang benar-benar dapat menyuguhkan serta memberikan argumentasi yang kuat ke arah mana kebijakan tersebut harus lebih difokuskan. Adapun pembahasan revolusi industri 4.0.dalam hubungannya dengan persoalan SDM, maka tidak mungkin dapat dipisahkan dengan pendidikan. Sebab disinilah dibutuhkan pendidikan yang berkualitas, yang dapat mendukung tercapainya cita-cita bangsa dalam memiliki sumber daya yang bermutu (Sahroni, 2017;115).

Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam bidang pendidikan sudah sepatutnya bertindak responsif dan progresif dalam pengambilan kebijakan, sehingga dapat secepat mungkin menjawab tantangan besar revolusi industri 4.0.khususnya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDM Indonesia. Mengingat bahwa kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tentunya berpengaruh signifikan terhadap proses pembelajaran yang nantinya akan bermuara kepada SDM sebagai *output* yang dihasilkannya. Oleh karena itu, Pemerintah dituntut harus peka, tanggap, dan cepat dalam merancang grand desain kebijakan pendidikan prospektif dan futuristik yang arah atau orientasinya mampu mempersiapkan manusia-manusia Indonesia menjadi SDM yang bukan hanya sekedar berjiwa tangguh dan handal, tetapi juga berkarakter baik yang didukung oleh produktifitas, kreatifitas, dan inovasi yang tinggi dalam menghadapi ketatnya kompetisi atau persaingan global di era revolusi industri 4.0. ini. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka judul penelitian ilmiah ini adalah Grand Desain Kebijakan Strategis Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial yang tertuju pada pemecahan masalah di masa sekarang dan mendatang. Gaya penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011:73). Adapun gejala sosial ataupun fenomena yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkembangan revolusi industri 4.0. yang terjadi di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Subjek dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum terdiri dari empat macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi,

dan gabungan atau triangulasi (Sugiyono, 2011:309). Terkait dengan penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan literatur. Studi literatur yang dilakukan, yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pemerintah Di Era Revolusi 4.0 Dalam Bidang Pendidikan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan zaman (Marlina, 2015). Pesatnya perkembangan Iptek pada gilirannya memicu lahirnya revolusi industri 4.0. Tetapi di era revolusi industri 4.0. ini mayoritas negara di dunia, baik yang tergolong maju maupun yang sedang berkembang, tengah berada pada tingkat kecemasan yang cukup tinggi. Hal tersebut selaras dengan kemunculan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kegamangan dan ketidakpastian. Lebih-lebih hingga saat ini tidak ada manusia yang berhasil meramalkan atau memprediksi secara tepat dan akurat mengenai apa yang akan terjadi di masa depan (Santika, 2020). Terlepas dari dan bagaimana revolusi industri 4.0 kelak akan berujung, maka perbaikan terhadap sumber daya manusia (SDM) tidak bisa ditunda-tunda lagi. Jika dicermati sampai detik ini Indonesia masih jauh tertinggal dalam merespon tantangan revolusi industri 4.0 apabila dibandingkan dengan negara lainnya.

Menyadari hal itu, mau tidak mau, antisipasi futuristik harus dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah sesungguhnya sudah merancang atau menyusun *road map* dan strategi dalam memasuki era digital. Presiden Jokowi pada 4 April 2019 kemudian meluncurkan *Making Indonesia 4.0*. Peta jalan tersebut dirancang untuk memacu daya saing Indonesia melalui penggunaan teknologi. *Making Indonesia 4.0* mencerminkan keseriusan negara yang sedang beradaptasi dengan ragam perubahan besar dan mendasar pada era revolusi industri 4.0. Indonesia di masa depan akan lebih berfokus pada lima sektor manufaktur unggulan, yaitu (1) industri makanan dan minuman, (2) tekstil dan pakaian, (3) otomotif, (4) kimia, serta (5) elektronik.

Lima industri tersebut dimaksudkan sebagai tulang punggung dan penggerak utama yang ke depannya diharapkan membawa implikasi yang signifikan dalam hal daya saing dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Kelima sektor inilah yang akan menjadi pelopor bagi penerapan industri 4.0, penciptaan lapangan kerja baru, dan investasi baru berbasis teknologi. Implementasi revolusi industri 4.0 yang rencananya menambah

lapangan kerja baru tentunya memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Oleh karena itu, SDM Indonesia haruslah dibekali dengan *lifeskill*, sehingga kemunculan revolusi industri 4.0 tidak lagi dinilai mengancam penyerapan tenaga kerja, namun justru menambah jumlah tenaga kerja baru dengan lapangan kerja yang berbeda. Di sinilah kewajiban negara dalam mempersiapkan generasi milenial menjadi tenaga kerja yang produktif, kreatif, dan juga kompetitif di era revolusi industri 4.0. Pemerintah sebagai penanggungjawab tertinggi dalam meningkatkan mutu/kualitas SDM, sudah seharusnya responsif dan progresif dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung kesediaan tenaga kerja Indonesia yang terampil dalam menyambut atau menyongsong datangnya revolusi industri 4.0.

Jika berbicara soal SDM, maka pendidikan merupakan sektor utama yang perlu diperhatikan, diintensifkan, dan diprioritaskan penanganannya. Karena melalui pendidikan beragam keterampilan terutama keterampilan hidup (*lifeskill*) dapat dikembangkan. Di samping tentu saja berbagai pengetahuan dan sikap yang perlu dikuasai dan ditampilkan oleh setiap orang jika mau hidup secara layak dalam dunia yang berkembang sangat pesat ini (Wardani, 2012). Oleh karena itu, pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini perlu diarahkan untuk mencetak profil lulusan yang bukan hanya tangguh dan handal, tetapi juga berkarakter baik, sehingga menjadi SDM bermutu dan berdaya saing tinggi. Dalam mempersiapkan SDM berkualitas, maka pendidikan sebagai agen perubahan menjadi sorotan utama atau tumpuan sentral bagi negara untuk selalu mengikuti arus revolusi industri 4.0. Sebab fungsi instrumental pendidikan ialah menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas untuk mengisi, mengiringi dan mewarnai perkembangan revolusi industri 4.0. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 menghendaki dan menuntut perubahan total mulai dari strategi belajar, pola berpikir, dan cara bertindak, baik itu guru maupun peserta didik dalam mengembangkan semangat kreatifitas dan inovasinya di berbagai bidang kehidupan. Guru di masa depan harus mampu menyesuaikan diri, beradaptasi, dan berkolaborasi dengan perubahan zaman termasuk kemajuan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga mampu mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Melalui pembelajaran ada tiga keterampilan (*skills*) sebagai kemampuan dasar yang harus dibangkitkan secara seimbang pada setiap peserta didik agar ke depannya muncul generasi milenial yang mampu menjawab tantangan besar revolusi industri 4.0 tersebut (Santika, 2019). Ketiga kemampuan dasar yang dikembangkan, yaitu pertama ialah *life skills* yang membekali peserta didik dalam memahami dirinya sendiri dan bertanggung jawab

terhadap lingkungan sosialnya. Kedua, adalah *learning and innovation skills* yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk selalu kreatif, berpikir kritis, dan mendestruksi permasalahan kompleks, mampu berkolaborasi, serta berkomunikasi secara efektif. Ketiga, yaitu *literacy skills* yang dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari yang dihadapinya. Dalam konteks ini semua pihak harus ikut berkontribusi positif, terutama pemerintah sebagai penanggungjawab utama di bidang pendidikan. Sebab untuk merespon dan menjawab tantangan kompleks revolusi industri 4.0. Pemerintah harus merevitalisasi pendidikan melalui serangkain kebijakannya. Dengan adanya dorongan regulasi Pemerintah yang mengarahkan pendidikan menuju revolusi 4.0 maka *output* yang dihasilkan menjadi lebih siap bertarung dan berkompetisi di dunia kerja.

Menyongsong hadirnya era revolusi industri 4.0, Pemerintah pun telah mengambil sejumlah terobosan mendasar dan fundamental melalui kebijakannya di bidang pendidikan. Meskipun banyak regulasi Pemerintah di bidang pendidikan, tetapi berdasarkan kajian penulis yang berkaitan langsung dengan revolusi industri 4.0 secara garis besarnya akan dibahas tiga kebijakan saja, yaitu Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan Gerakan Literasi Nasional (GLN).

#### **Kurikulum 2013 (K13).**

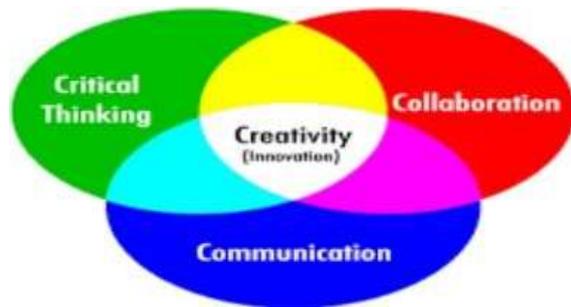
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan, bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Hal itu sesuai dengan pernyataan Adriantoni dan Fitriani (2018), bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Senada dengan pendapat tersebut, Heimonen dalam Astuti (2011), mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana kegiatan. Aktivitas ini didesain untuk mengimplementasikan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, peranan kurikulum sendiri bersifat strategis dan fundamental dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan nasional. Menyadari pentingnya kurikulum, pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu telah melakukan berbagai upaya untuk merevisi (mengubah), mengembangkan, dan menyempurnakan desain kurikulum pendidikan nasional Indonesia. Semua itu harus dilakukan Pemerintah Indonesia agar dapat menghasilkan proses dan produk (*output*) pendidikan yang bermutu maupun kompetitif di dunia global. Perubahan ataupun penyempurnaan kurikulum menjadi hal biasa dilakukan di negara mana pun di dunia sebagai wujud atau manifestasi dari responsifnya sebuah kurikulum dengan terjadinya perubahan/perkembangan, baik

dalam kehidupan lokal, nasional, dan global. Perubahan tersebut menjadi alasan utama yang kemudian digunakan oleh perancang kurikulum untuk melakukan perubahan kurikulum tersebut (Sam dan Tuti, 2007). Kurikulum idealnya adaptif dengan perubahan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tujuannya agar luran pendidikan memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan tantangan zaman (Prastowo, 2018). Oleh karena itu, kurikulum harus selalu diperbaharui dan disesuaikan dengan relevansi kebutuhan zaman. Paradigma baru pengembangan kurikulum harus sudah mulai bergeser dari yang selama ini bersifat *supply-driven* (didorong semata oleh lembaga/satuan pendidikan) menjadi *demand-driven* (didorong bersama antara lembaga atau satuan pendidikan dengan dunia kerja). Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia secara berkesinambungan telah melakukan rekonstruksi kurikulum, yaitu mulai dari kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, kurikulum 2004 (KBK), kurikulum 2006 (KTSP), dan hingga baru-baru ini pemerintah juga melakukan perubahan dari kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 (Bashori, 2015). KTSP dipandang Pemerintah sudah tidak memadai lagi dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan juga mengakomodir kebutuhan kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa (DPR RI, 2014).



Gambar 1. Kurikulum dari masa ke masa.

Sebagaimana diketahui, bahwa kurikulum 2013 di dalam materinya mengasah empat aspek penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Dalam mempersiapkan SDM handal di era industri 4.0 Pemerintah telah berupaya keras membekali peserta didik dengan kurikulum 2013 yang mengharuskan mereka memiliki pemikiran kritis, *skill* yang banyak, kreativitas tinggi, dan kolaborasi. Dalam proses pembelajarannya pun dilaksanakan melalui penguatan kemampuan berpikir tingkat tinggi/*higher order thinking skills* (HOTS). Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini merupakan buah pikiran dari Taksonomi Bloom yang bertujuan menumbuhkan keterampilan dasar bagi peserta didik yang terangkum dalam 4C, yaitu *creativity, critical thinking and complex problem solving, collaboration, communication*.



Gambar 2. Empat keterampilan hidup.

Empat keterampilan hidup di atas adalah kemampuan utuh yang menjadi bagian integral kurikulum 2013 dan perlu dimiliki peserta didik dalam menjawab tantangan besar revolusi industri 4.0. Paling tidak, bahwa kurikulum 2013 dalam sistem pendidikan nasional Indonesia di abad 21 hendak melahirkan pribadi handal dan unggul sebagai cerminan dari 4 K tersebut, yaitu.

- K pertama adalah *keterampilan berpikir kritis* yang harus dimiliki generasi penerus bangsa melalui pendidikan. Dengan dibekali kemampuan ini, peserta didik dapat dengan mudah mengurai dan mendestruksi persoalan baru yang sama sekali belum pernah dijumpai sebelumnya.
- K kedua adalah kreatif yang diperoleh melalui pembelajaran di sekolah. Pembelajaran harus benar-benar mampu mengarahkan peserta didik menjadi *kreatif* dengan modal utama keberanian untuk senantiasa berinovasi atau menciptakan hal-hal baru yang bermutu atau berkualitas.
- K ketiga adalah *keterampilan komunikasi* handal yang harus dimiliki dan dikuasai peserta didik sebagai pegangan normatif untuk menyampaikan atau mengungkapkan ide, pikiran, gagasan dengan lugas dan benar melalui berbagai macam saluran, misalnya dengan memanfaatkan media di era digital ini.
- K keempat adalah *keterampilan bekerja sama* (kolaborasi) sebagai manifestasi dari kodrat manusia yang merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticon*). Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, kemampuan peserta didik untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mencapai mimpi bersama itu sangat dibutuhkan.

Empat K tersebut sebagaibagian integral dari kurikulum 2013 merupakan bekal sangat penting bagi generasi penerus bangsa untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Tentu yang paling utama dari semua itu adalah nilai-nilai moral dan agama yang dalam setiap kesempatannya selalu diajarkan di rumah, sekolah, dan rumah ibadah. Sebab perbedaan mendasar antara manusia dengan robot hanyalah karakter dan hati nurani. Karena disaat kecerdasan otak manusia dan robot berada pada level yang sama, setidaknya manusia masih memiliki hati nurani untuk merasakan, sedangkan robot tidak memiliki hal itu. Sehingga pekerjaan yang sifatnya rutinitas,

manual, dan kognitif lambat laun akan tergeser dan tergantikan oleh kecanggihan mesin. Oleh karena itu, *output* atau lulusan pendidikan harus disiapkan dengan modal kecakapan hidup (*lifeskill*) supaya mampu menciptakan peluang atau lapangan kerja baru. Bahkan pedagogi pembelajaran menurut versi kurikulum 2013 mulai dari jenjang SD harus bergeser dan berubah, dari konsep *knowledge based learning* beralih ke *project based learning*. Siswa diajarkan untuk belajar menganalisis dan memecahkan masalah (*problembasedlearning*) yang ada di sekitarnya secara bersama-sama atau berkolaborasi dengan pendekatan interdisiplin. Model pembelajaran seperti ini selaras dengan Kurikulum 2013, karena merangsang tumbuhnya inovasi, kreativitas, empati, leadership, dan kolaborasi peserta didik sejak dini (Santika, 2017). Sedangkan proses pembelajaran menurut Kurikulum 2013 untuk semua jenjang pendidikan dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan ilmiah (saintifik). Adapun langkah-langkah pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta (Lambang dkk, 2014). Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik.

#### Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi mendorong hadirnya era baru, yaitu revolusi industri 4.0. Berbagai kebijakan strategis pun digelontorkan pemerintah guna menghadapi era ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat lini pendidikan melalui program penguatan pendidikan karakter (PPK). Secara historis, pendidikan karakter sebenarnya sudah pernah diluncurkan dan digalakan sebagai gerakan nasional pada tahun 2010. Namun, gema gerakan pendidikan karakter ini dirasa belum cukup kuat. Karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Kemendikbud, 2017). Gerakan PPK selain sebagai keberlanjutan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam Nawa Cita disebutkan, bahwa Pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kemendikbud mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan PPK yang digulirkan sejak tahun 2016. Adapun yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan PPK, yaitu.

1. Berlangsungnya revolusi industri keempat yang ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital;

2. Perubahan peradaban masyarakat yang ditandai dengan berubahnya sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan;
3. Semakin tegasnya fenomena Abad Kreatif yang menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan negara

Dalam rangka mempersiapkan Generasi Emas 2045, pemerintah telah menguatkan karakter generasi muda agar memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21 (Haidar, 2017). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah menyediakan landasan yuridis menyangkut kebijakan PPK yang diterapkan di Indonesia.

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Agenda Nawacita No. 8: Penguatan revolusi karakter bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik sebagai bagian dari revolusi mental.
3. Trisakti: Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan.
4. RPJMN 2015-2019: Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran.
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.



Gambar 3. Latar belakang PPK

Dalam Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, PPK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Menurut Alawiyah (2012), pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila) (Santika, 2021). Pendidikan karakter merupakan upaya negara untuk membangkitkan, menumbuhkan, dan membekali generasi penerus agar mempunyai karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21, yaitu mampu berpikir secara kritis, analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembentukan karakter SDM menjadi usaha vital untuk dapat menghadapi tantangan nasional, regional, dan global. Tantangan yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana generasi muda penerus bangsa memiliki kemampuan kognitif serta aspek afektif dan moralitas (Lestari, 2014).

Perlu dipahami bersama, bahwa revolusi industri itu tidak akan pernah diam dan berhenti di satu masa, melainkan secara perlahan tapi pasti akan segera berpindah posisi lagi ke 5.0, 6.0, dan seterusnya. Di sinilah makna dan peran PPK sangatlah fundamental, sebab yang perlu dijaga dan tidak akan pernah berubah adalah nilai etik dan moral manusia. Erik menyatakan, revolusi industri 4.0 yang identik dengan teknologi juga memiliki resiko yang berdampak negatif pada aspek etika dan moral. Dengan demikian, institusi pendidikan harus mampu menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam melahirkan inovasi-inovasi agar sisi kemanusiaan tidak termakan teknologi. Terlebih lagi, bahwa dibalik sukses ekonomi dan teknologi yang ditunjukkan negara-negara maju, semua itu semula disemangati nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan bisa dijalani lebih mudah, lebih produktif, dan lebih bermakna (Silkyanti, 2019). Dari sisi pendidikan karakter, bahwa pada era sekarang, bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang harus dibekali, tetapi juga pengetahuan tentang hakekat manusia itu sendiri. Ilmu teknologi tidak perlu diajarkan, namun hal yang paling penting adalah bagaimana menanamkan kepada manusia untuk menjadi manusia berkarakter supaya bijak dalam mengaplikasikan teknologi, baik mulai masa kini hingga masa depan. Sehingga, generasi penerus bangsa yang mengenal jati dirinya akan mampu mengimbangi atau mengendalikan kemajuan dan teknologi sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, generasi yang kehilangan jati dirinya akan menjadi budak teknologi, karena teknologilah yang akan mengendalikan hidupnya. Caranya ialah dengan mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai poros dalam pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah NKRI. Pendidikan

karakter memiliki fungsi strategis dan efektif bagi proses perubahan sosial dalam masyarakat jika dilaksanakan dengan terarah dan direncanakan melalui dukungan banyak pihak yang memiliki otoritas, terutama otoritas negara (Kusuma, 2010). Berikut ini adalah skema nilai-nilai utama karakter yang harus ditanamkan atau ditumbuh kembangkan pada peserta didik melalui kegiatan pendidikan.



Gambar 4. Nilai-Nilai Utama Karakter Gerakan Literasi Nasional (GLN).

Kebijakan strategis dibidang pendidikan lainnya yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 adalah dengan mencanangkan dan mengkampanyekan gerakan literasi nasional (GLN) secara terstruktur, sistematis, dan masif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Secara historis dan yuridis perlu dipahami bersama, bahwa sejak tahun 2016 Kemendikbud menggiatkan GLN sebagai bagian dari implementasi dari Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Pemerintah optimis revolusi industri 4.0. akan menguntungkan Indonesia bila penguatan literasi melalui GLN didukung oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Adapun penguatan GLN ini meliputi literasi baca tulis, literasi sains, literasi numerasi, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewarganegaraan.



Gambar 5. Komponen Gerakan Literasi Nasional

Saat ini Indonesia tengah memasuki revolusi industri 4.0, yaitu era dimana dunia industri digital telah menjadi suatu paradigma dan acuan dalam tatanan global. Era revolusi industri 4.0. hadir bersamaan dengan era disrupsi. Oleh karena itu, untuk menghadapi revolusi industri 4.0 atau era disrupsi diperlukan “literasi baru” selain literasi lama. Literasi lama yang ada saat ini digunakan sebagai modal untuk berkiperah dalam kehidupan masyarakat. Secara konseptual definisi literasi yang diadopsi dan disosialisasikan Kemendikbud bukanlah

sekadar kegiatan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi dipahami sebagai kemampuan mengakses, mencerna, dan memanfaatkan informasi secara cerdas. Munculnya era literasi baru tidak lepas dari era revolusi industri 4.0. Literasi ini terkait dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan membuat konklusi berpikir berdasarkan data dan informasi (*big data*) yang diperoleh. Literasi baru ini berhubungan dengan kemampuan memahami berbagai perkembangan teknologi dan bagaimana memanfaatkannya bagi kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS), kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif dan inovatif.

Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas partisipasi publik dalam menumbuh kembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini akan dilakukan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Meningkatkan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak berdiri parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab stakeholder atau semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat fundamental untuk memastikan meningkatnya daya saing bangsa. Apalagi tingkat literasi telah menjadi tolak ukur kemajuan bangsa. Jika semakin tinggi tingkat literasi bangsa, maka semakin maju pula bangsa tersebut. Oleh karena itu, GLN dimaksudkan menjadi landasan utama untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Ciri-ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang sangat kokoh dalam membangun tradisi literasinya.

Adapun landasan yuridis yang memayungi Gerakan Literasi Nasional ini adalah sebagai berikut.

1. UUD 1945 amendemen Bab XV Pasal 36 tentang Kedudukan Bahasa Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. UU Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Kemendikbud, 2016).

Literasi ini memiliki kedudukan penting di dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi manusia-manusia yang hidup di abad ini, dimana teknologi merajai dunia. Oleh karena itu, literasi ini sangat diperlukan dalam segala lini kehidupan manusia karena kemampuan literasi ini bisa menjadi kunci manusia untuk berproses menjadi manusia yang lebih berpengetahuan dan berperadaban. Dengan gerakan literasi ini, manusia mampu memahami gejala/fenomena kehidupan, baik yang konstruktif maupun destruktif. Apalagi tantangan nasional dan global semakin berat saja, sehingga setiap orang harus memiliki kemampuan memprediksi setiap perubahan. Manusia harus lihai dan lincah dalam mengikuti arus perkembangan zaman agar jangan sampai tergilas oleh kejamnya kompetisi global. Segala peluang dan potensi yang tersedia harus dimanfaatkan seefektif/seoptimal mungkin, sehingga tetap bertahan (*survive*). Hal tersebut menandai lahirnya fenomena abad kreatif (abad ke-21) yang menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis yang tidak hanya berpotensi positif, tetapi juga negatif (Kemendikbud, 2017).

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan dan saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa dunia pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, sedang memasuki era industri baru yang ditandai dengan era digitalisasi di pelbagai sektor kehidupan. Para pakar menyebut ini sebagai era revolusi industri 4.0. Pesatnya perkembangan teknologi digital diyakini akan semakin memudahkan dan meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi manusia dalam melakukan kegiatannya di segala bidang kehidupannya. Revolusi industri dapat diartikan sebagai suatu perubahan besar yang secara cepat, mendasar, dan radikal yang mempengaruhi corak kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 akan membawa dan mendorong beragam perubahan, baik ke arah yang positif maupun negatif bagi kehidupan umat manusia. Menyadari hal itu, mau tidak mau,antisipasi dini harus segera dilakukan Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah merancang atau menyusun *road map* dan strategi dalam memasuki era digital, *Making Indonesia 4.0*. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan SDM yang handal dan tangguh. Atas dasar itu, Pemerintah membuat kebijakan strategis dalam bidang pendidikan. Adapun kebijakan strategis pemerintah dibidang pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. yaitu Kurikulum 2013 (K13), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan Gerakan Literasi Nasional (GLN).

## Saran

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu.

1. Grand desain kebijakan Pemerintah dibidang pendidikan harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen untuk menjawab tantangan besar revolusi industri 4.0. Mengingat langgam perubahan dunia berjalan begitu cepat dan tak dapat diprediksi ke depannya
2. Road map dan strategi yang dirancang atau disusun Pemerintah Indonesia dalam menapaki era digital harus sungguh-sungguh dijalankan secara berkelanjutan dan berkesinambungan supaya Indonesia mampu menjawab tantangan zaman yang perubahannya begitu dinamis.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adriantoni dan Fitriani, 2018, Problematika Dan Solusi Implementasi Kurikulum 2013 (Studi Kasus Implementasi Kurikulum 2013 di SMPN 31 Padang). *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* – 5 (2), 111-112.
- Alawiyah, Faridah. (2012). Kebijakan Dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan Di Indonesia. *Aspirasi*, 3 (1), 87-101.
- Arief, Barda Nawawi. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Kun Setyaning. (2011). *Pengembangan Model Pembelajaran Karakter Berbasis Seni dalam Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Bambang dkk. (2014). Implementasi Kurikulum Pada Jenjang SD, SMP, SMA, Dan SMK Di Kalimantan Timur Tahun 2013/2014. ©*Pancaran*,3 (4), 131-144.
- Bashori. (2016). Manajemen Perubahan Kurikulum KTSP 2006 Ke- Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 1 Kediri. *Jurnal LPPM*, 4 (2), 94-106.
- DPR RI. (2019). *Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pelaksanaan Kurikulum 2013 Komisi X DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan Masa Persidangan I , Tahun Sidang 2014-2015, Tanggal 2-4 Desember 2014*. Jakarta: DPR RI.
- Haidar, Muslim. (2017). *Peran Pendidikan Luar Sekolah Dalam Penguatan Pendidikan Karakter. Sinergitas Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Penguatan Pendidikan Karakter*. Makalah dipresentasikan pada *Seminar Nasional Pendidikan –Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, 16 September*, (pp. 321-329).
- Hasbullah, H.M. 2015. *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriani, Rakhmawati. Implementasi Kebijakan Pendidikan. Diakses pada 12 Juni 2020 melalui alamat <https://indrycanthiq84.wordpress.com/pendidikan/implementasi-kebijakan-pendidikan/>.
- Kemendikbud. (2017). *Panduan Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2016). *Pedoman Gerakan Nasional Literasi Bangsa Menciptakan Ekosistem Sekolah dan Masyarakat Berbudaya Baca-Tulis serta Cinta Sastra “Mari menjadi bangsa pembaca”*. Jakarta: Bidang Pembelajaran Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Kusuma, Doni A. (2010). *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Marlina, Leny. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pendidikan. *Stinbath*, 15 (14), 123-139.
- Mira Marleni, Pandie dan Ivan Th. J. Weismann.(2016). Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makasar. *Jurnal Jaffray*, 14 (1),43-62.
- Muhardi. (2014). Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa. 20(4), 478-492.
- Sahroni, Dapip. (2017). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran. *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*, 1 (1), 115-124.
- Sam, M. Chan dan Tuti T. Sam. (2007). *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 6 (1), 6-36. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001>
- Santika, I. G. N., Sujana, G., &Winaya., M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*. 4 (2), 89-98. <https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391>
- Santika, I Gusti Ngurah. 2017. Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Widya Accarya*. 7 (1).
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No. 79 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Inobali 2019*, 79, 981–990

- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional 1 Hukum dan Kewarganegaraan*. 1 (1), 74-85. <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/sennashk/article/view/1665>
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 5 (1), 23-34. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777>
- Santika, I. G. N. (2017). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kepedulian Lingkungan Untuk Membebaskannya Dari Bencana Banjir. *Widya Accarya*. 9 (2).
- Santika, I. G. N. (2020). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. 6 (2), 127-137. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v6i2.28437>
- Silkyanti, Fella. (2019). Analisis Peran Budaya Sekolah yang Religius dalam Pembentukan Karakter Siswa. *IVCEJ*, 2 (1), 36-42.
- Suwardana, Hendra. (2018). Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental. Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. *Jati Unik*, 1 (2), 102-110.
- Prastowo, Andi. (2018). Transformasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Indonesia (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menuju Kurikulum 2013 Hingga Kurikulum Ganda). *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, 4 (2), 111-125.
- Wardani, I.G.A.K. (2012). Mengembangkan Profesionalisme Pendidik Guru (Kajian Konseptual dan Operasional). *Jurnal Pendidikan*, 13 (1), 32-44.
- Wurianto, Arif Budi Wurianto. (2018). Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Sosio-Humaniora Menghadapi Revolusi Industri Era 4.0. Makalah dipresentasikan pada Copyright *Seminar Nasional Vokasi Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 14 November